

UNIT PELAKSANA TEKNIS HUMAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

KLIPING

Klasifikasi : Universitas Diponegoro

Tema : Teknologi Tepat Guna Undip

Surat Kabar / Majalah : Suara Merdeka

Hari Sabtu , Tanggal 30, Bulan Oktober , Tahun 2010, Halaman 18 Kolom --

Ringkasan :

When the lies and manipulation are considered as fairness. Community cloud or political partners is positioned as an instrument for realizing personal interests.

Catatan :

Politik Tanpa Kepercayaan



Oleh

Triyono Lukmantoro

”

Kenyataan itu dibuktikan ketika kebohongan dan manipulasi dianggap sebagai kewajaran. Masyarakat awam atau mitra politik, sekadar diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan sendiri

”

KEKECEWAAN masyarakat yang makin merosot adalah penanda paling penting dari usia satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono. Fenomena itu dapat dilacak pada hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) akhir September-awal Oktober 2010. Lembaga itu menyatakan bahwa publik yang merasakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam hubungan internasional hanya 42,6%, persentase dalam bidang lain tidak jauh meleset dari angka itu.

Publik yang menyatakan puas dalam bidang ekonomi 43,9%, penegakan hukum 49,5%, dan politik 49,2%. Publik hanya menyatakan puas pada dua bidang, yakni keamanan 63,2% dan sosial 60,2%.

Banyak alasan yang dapat dikemukakan kenapa merasa tidak puas, seperti ketidaktegasan SBY kepada Malaysia yang selama ini dinilai merongrong kedaulatan, kemiskinan yang tidak segera dituntaskan, keadilan yang memungungi hati nurani, dan politik yang sekadar digunakan sebagai wadah transaksi kekuasaan.

Usia satu tahun rezim SBY-Boediono juga ditandai dengan kemarahan mahasiswa yang dapat dilihat dari demonstrasi di sejumlah kota. Ketidakpuasan publik dan kemurkaan kalangan terpelajar merupakan reaksi yang ditunjukkan pihak eksternal. Dari pihak internal pun reaksi diperlihatkan. Isu kocok ulang (*reshuffle*) Kabinet Indonesia Bersatu II nyaring menggema. Partai yang terhimpun dalam koalisi pendukung SBY terlibat dalam perang ucapan.

Partai Amanat Nasional (PAN) menyodok Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera pun lantas menyinggung Partai Golkar. Persoalan dalam sodokan dan singgungan itu adalah pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Dalam sisi lain, SBY pun menunjukkan ke-*risauannya* terhadap dukungan partai-partai. Dalam perayaan HUT Ke-9 Partai Demokrat, SBY berseru kepada partai yang bermitra, untuk tidak menciptakan pertikaian. "Posisi politik boleh berbeda, tetapi demi rakyat, jangan membuat pertentangan".

Pernyataan itu justru hanya makin menegaskan bahwa partai yang terhimpun dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) mengalami perpecahan dan ketidakompakan.

Komitmen

Politik yang harus dimaknai sebagai domain menciptakan kebaikan bersama (*bonnum commune*) akhirnya hanya dipenuhi sikap saling curiga. Setiap pihak yang berada dalam arena perpolitikan saling memandang bahwa ada tipu muslihat sedang dimainkan. Politik sebagai sarana (*means*) pada titik puncaknya hanya beralih fungsi sebagai tujuan (*ends*) mengakumulasikan kekuasaan itu sendiri.

Kepercayaan pada perpolitikan bukan sekadar masing-masing pihak memberi hormat (*respect*). Sebagai sumber daya sosial, sebagaimana diki-

mukakan oleh Piotr Sztompka (*Trust: A Cultural Resource*, 2010), kepercayaan merupakan pertarungan tentang tindakan kontingensi yang terjadi pada masa depan.

Soalnya, kepercayaan merupakan strategi mengatasi ketidakpastian, ketidakmungkinan prediksi, dan kesulitan mengendalikan berbagai perilaku di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memuat dua komponen utama, yakni keyakinan dan komitmen.

Lebih penting lagi adalah kepercayaan yang hilang dalam perpolitikan secara cepat atau lambat pasti menghancurkan tatanan. Sissela Bok, sebagaimana dikutip James A Jaksa dan Michael S Pritchard (*Communication Ethics*, 1994) menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam kepercayaan. Pertama; pihak lain memperlakukan kita dengan jujur.

Kedua; pihak lain menempatkan kepentingan kita sebagai hal utama. Ketiga; pihak lain tidak merugikan kita. Dalam wilayah perpolitikan, tiga hal itu adalah nilai-nilai keutamaan yang pada saat ini makin tipis eksistensinya.

Kenyataan itu dibuktikan ketika kebohongan dan manipulasi telah dianggap sebagai kewajaran. Pihak lain, entah masyarakat awam atau mitra politik, sekadar diposisikan sebagai instrumen (perkakas) untuk mewujudkan kepentingan sendiri. Menciptakan kerugian bagi pihak lain, seperti penderitaan dan pengkhianatan, telah dipandang sebagai risiko politik. Politik hanya dinobatkan sebagai aksi-aksi yang memiliki konsekuensi penuh kejutan. (10)

— **Triyono Lukmantoro**, dosen FISIP
Universitas Diponegoro